PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

Oleh:
Ida Bagus Dwi Suryana Putra
Email: gusdwik.gd@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang menuntut peran aktif Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik dalam penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar serta bagaimana peran Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan jaksa pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Denpasar serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pedoman internal Kejaksaan, dimulai dari tahap penyelidikan, peningkatan status perkara ke penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga berkas perkara dinyatakan lengkap. Selain itu, peran Kejaksaan dalam penyidikan bersifat strategis karena Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali perkara sejak tahap awal hingga penuntutan, meskipun dalam praktik masih terdapat kendala teknis dan koordinasi antarinstansi yang mempengaruhi efektivitas penyidikan.
Kata Kunci: Kejaksaan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruption crimes which requires an active role of the Public Prosecutor's Office not only as a public prosecutor but also as an investigator in law enforcement. The research problems addressed in this study are how the mechanism and procedures of corruption investigation are implemented at the Denpasar District Prosecutor's Office and how the role of the Prosecutor's Office is carried out in such investigations. This research uses empirical legal research with data collection techniques through direct interviews with prosecutors of the Special Crimes Division at the Denpasar District Prosecutor's Office and supported by literature studies on relevant laws and legal references. The results of the research indicate that the mechanism and procedures for investigating corruption crimes at the Denpasar District Prosecutor's Office have been implemented in accordance with criminal procedural law and internal guidelines of the Prosecutor's Office, starting from the investigation stage, escalation of cases to formal investigation, examination of witnesses and suspects, until the case files are declared complete. Furthermore, the role of the Prosecutor's Office in corruption investigation is strategic since it functions as the controller of the case from the early stage of investigation to prosecution, although in practice there are still technical constraints and inter-agency coordination issues that affect the effectiveness of the investigation process.

Keywords: *Prosecutor's Office, Investigation, Corruption Crime.*